



Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, MPA.
 Dr. Dahlan, S.Pd., M.Pd., M.Si.
 Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A., Ph.D (G).

SISTEM POLITIK INDONESIA

Sistem politik Indonesia telah menjadi pusat perhatian dalam kajian politik kontemporer di tingkat lokal maupun internasional. Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan dinamika politik yang unik yang telah membentuk sistem politiknya saat ini. Dengan populasi yang beragam, kekayaan budaya, dan tantangan serta peluang yang beragam, sistem politik Indonesia mencerminkan perjuangan bangsa ini dalam mengembangkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem politik Indonesia, mulai dari sejarah pembentukannya hingga dinamika politik saat ini. Kami akan menjelajahi struktur pemerintahan, peran partai politik, proses pemilihan umum, isu-isu politik yang sedang berlangsung, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan negara.

Buku ini membahas tentang Pengantar Sistem Politik Indonesia, Struktur Pemerintahan Indonesia, Peran Partai politik Indonesia, Proses Legislasi dan Kebijakan Publik, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Dinamika Politik Kontemporer, Tantangan dan Prospek Sistem Politik Indonesia.

SISTEM POLITIK Indonesia



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
 ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
 Email : penerbitmafya@gmail.com
 Website : penerbitmafya.com
 FB : Penerbit Mafya



SISTEM POLITIK INDONESIA

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



SISTEM POLITIK INDONESIA

Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, MPA.

Dr. Dahlan, S.Pd., M.Pd., M.Si.

Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A., Ph.D (C).



SISTEM POLITIK INDONESIA

Penulis:

Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, MPA.

Dr. Dahlan, S.Pd., M.Pd., M.Si.

Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A., Ph.D (C).

Editor:

Annisa Febryanti, S.IP.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

x, 105 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8659-77-7

Cetakan Pertama:

Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA	viii
PENDAHULUAN	1
BAB I PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA	3
A. DEFENISI SISTEM POLITIK	3
1. Tujuan Sistem Politik	5
2. Sistem Politik di Indonesia	6
B. NEGARA DAN PEMERINTAHAN	7
1. Fungsi-fungsi Utama Negara dan Pemerintahan.....	7
2. Prinsip-prinsip Hukum dan Konstitusi.....	9
C. SISTEM PRESIDENSIAL	10
1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan..	11
2. Pemilihan Umum	12
D. ISU-ISU POLITIK KONTEMPORER DI INDONESIA	13
BAB II STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA	15
A. CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA	15
B. BADAN EKSEKUTIF	17
C. BADAN LEGISLATIF	18
D. BADAN YUDIKATIF	20
1. Mahkamah Agung (MA)	20
2. Mahkamah Konstitusi (MK)	20
E. PEMERINTAH DAERAH	21
1. Pemerintah Provinsi.....	21
2. Pemerintah Kabupaten/Kota.....	22

F. OTONOMI DAERAH	23
1. Implementasi Otonomi Daerah	23
2. Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah	25
BAB III PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA.....	27
A. SEJARAH PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA	27
B. DINAMIKA PARTAI POLITIK PASCA-KEMERDEKAAN.....	28
C. ERA REFORMASI: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN BARU	30
D. PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES DEMOKRATISASI.....	31
1. Partai Politik Berfungsi Sebagai Alat Untuk Merekrut Dan Melatih Kader-Kader Politik.....	32
2. Partai Politik Memainkan Peran Dalam Memobilisasi Massa Dan Mengorganisir Partisipasi Politik Warga Negara.....	33
3. Partai Politik Bertanggung Jawab Dalam Menyusun Platform Politik Dan Mengemban Visi Serta Misi Dalam Pemerintahan.....	34
4. Partai Politik Berperan Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Memfasilitasi Negosiasi Antar-Kepentingan Politik Yang Beragam.....	35
E. IMPLIKASI PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA	36
BAB IV PROSES LEGISLASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	39
A. PENGERTIAN LEGISLASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	39
B. LEMBAGA LEGISLASI DI INDONESIA.....	44
1. DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat).....	44

2.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.....	45
C.	Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Legislasi.....	47
D.	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	49
BAB V	POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH.....	53
A.	DEFINISI POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH.....	53
1.	Konsep Politik Lokal dan Otonomi Daerah	53
2.	Perbedaan Politik Lokal dan Otonomi Daerah	55
B.	HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH..	57
1.	Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	57
2.	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mengawasi Pemerintahan Daerah.....	59
C.	PERAN PARTAI POLITIK DALAM POLITIK LOKAL	61
1.	Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	61
2.	Hubungan Antara Partai Politik Nasional dengan Cabangnya di Tingkat Daerah	62
D.	TANTANGAN DAN PELUANG DALAM OTONOMI DAERAH.....	64
BAB VI	DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER	67
A.	TEORI POLITIK KONTEMPORER	67
1.	Teori Negara Maxis.....	67
2.	Realisme dan Neorealisme	69
3.	Liberalisme dan Neoliberalisme.....	70
4.	Teori Demokrasi Deliberatif	71
5.	Teori Identitas dan Multikulturalisme.....	72
6.	Ekologi Politik.....	74

B. HAMBATAN DAN PELUANG POLITIK KONTEMPORER.....	76
BAB VII TANTANGAN DAN PROSPEK SISTEM POLITIK INDONESIA	81
A. SEJARAH DAN EVOLUSI SISTEM POLITIK INDONESIA.....	81
B. STRUKTUR DAN KERANGKA KONSTITUSIONAL	83
C. DINAMIKA POLITIK DALAM NEGERI	84
D. ISU-ISU KONTEMPORER DALAM POLITIK INDONESIA.....	86
E. Prospek dan Arah Masa Depan Sistem Politik Indonesia	87
F. STABILITAS POLITIK.....	88
G. Demokratisasi dan Konsolidasi Demokrasi .	90
KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
TENTANG PENULIS.....	101

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Sistem Politik Indonesia. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Pengantar Sistem Politik Indonesia, Struktur Pemerintahan Indonesia, Peran Partai politik Indonesia, Proses Legislasi dan Kebijakan Publik, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Dinamika Politik Kontemporer, Tantangan dan Prospek Sistem Politik Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 5 Maret 2024

PENDAHULUAN

Sistem politik Indonesia telah menjadi pusat perhatian dalam kajian politik kontemporer di tingkat lokal maupun internasional. Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan dinamika politik yang unik yang telah membentuk sistem politiknya saat ini. Dengan populasi yang beragam, kekayaan budaya, dan tantangan serta peluang yang beragam, sistem politik Indonesia mencerminkan perjuangan bangsa ini dalam mengembangkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem politik Indonesia, mulai dari sejarah pembentukannya hingga dinamika politik saat ini. Kami akan menjelajahi struktur pemerintahan, peran partai politik, proses pemilihan umum, isu-isu politik yang sedang berlangsung, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan negara. Dengan memahami sistem politik Indonesia dengan baik, kita dapat mengenali faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan politik, proses pembuatan kebijakan, dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, pemahaman yang lebih dalam tentang sistem politik Indonesia juga akan membantu kita mengidentifikasi potensi perubahan positif serta mengatasi tantangan yang dihadapi dalam upaya memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB I

PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA

A. DEFENISI SISTEM POLITIK

Sistem politik adalah sebuah konsep yang mencakup struktur, proses, dan dinamika interaksi antara berbagai lembaga, aktor, dan elemen-elemen politik dalam suatu negara atau wilayah. Secara fundamental, sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan dipertahankan, diorganisir, dan didistribusikan di dalam suatu entitas politik. Definisi sistem politik melampaui kerangka formal pemerintahan dan hukum, dan mencakup elemen-elemen yang lebih luas dari kehidupan politik (Roskin et al., 2008).

Pertama, sistem politik mengacu pada struktur kelembagaan suatu negara, yang mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur ini biasanya ditetapkan oleh konstitusi atau hukum dasar suatu negara dan menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan antar lembaga tersebut. Misalnya, dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden, sementara dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif tergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.

Kedua, sistem politik mencakup proses politik, termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan partisipasi politik. Proses politik ini adalah cara di mana kekuasaan dijalankan dan diimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari. Pemilihan umum adalah mekanisme utama di mana warga negara memilih perwakilan mereka untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Pembuatan kebijakan melibatkan interaksi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan aktor politik lainnya dalam menetapkan aturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat (Goodin, 2011).

Ketiga, sistem politik mencakup berbagai aktor politik yang berperan dalam proses politik. Aktor-aktor ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan, media, dan masyarakat sipil. Partai politik adalah organisasi yang memainkan peran sentral dalam sistem politik, mengajukan kandidat untuk pemilihan umum dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Kelompok kepentingan mewakili berbagai kepentingan dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang sesuai dengan agenda mereka. Media memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi politik dan memfasilitasi debat publik, sementara masyarakat sipil dapat menjadi agen perubahan melalui aksi politik dan advokasi.

Keempat, sistem politik mencerminkan nilai-nilai, norma, dan budaya politik suatu masyarakat. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, dan partisipasi politik membentuk dasar moral dan ideologis dari sistem politik. Budaya politik merujuk pada pola-pola perilaku politik, keyakinan, dan praktik yang mendefinisikan cara politik dijalankan dalam suatu masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem politik adalah kerangka yang kompleks yang mencerminkan dinamika kekuasaan, proses politik, aktor politik, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Memahami sistem politik suatu negara adalah langkah penting dalam menganalisis dan memahami dinamika politik yang memengaruhi kehidupan warga negara dan arah pembangunan suatu negara.

1. Tujuan Sistem Politik

Tujuan sistem politik adalah menciptakan suatu kerangka kerja yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sistem politik bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, mengatasi konflik, dan memfasilitasi pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu tujuan pokoknya adalah memberikan mekanisme bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam proses politik lainnya. Selain itu, sistem politik bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Melalui hukum dan regulasi, sistem politik harus memastikan keadilan dan kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau faktor lainnya (Kneuer & Milner, 2019).

Sistem politik juga memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pemerintah, dan penegakan hukum yang adil adalah aspek-aspek penting yang membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem politik yang efektif juga harus mampu menghasilkan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, sistem politik memiliki peran dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain melalui diplomasi dan kerja sama internasional. Kerja sama ini dapat mencakup perdagangan, keamanan, dan penanganan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan global.

Secara umum, tujuan sistem politik adalah menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlindungan hak-hak warga negara, partisipasi politik yang demokratis, dan integrasi yang baik dalam konteks global. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, sistem politik diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan positif dan harmoni di suatu negara.

2. Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menerapkan sistem politik presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, sebagai kepala eksekutif, memimpin kabinetnya untuk mengelola pemerintahan sehari-hari. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat dan bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan merepresentasikan kepentingan rakyat. Indonesia juga mengakui otonomi daerah, di mana provinsi dan kabupaten/kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur dan mengawasi urusan lokal. Sistem politik Indonesia juga melibatkan partai politik yang aktif dalam proses pemilihan dan pembentukan kebijakan.

Selain itu, Indonesia memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab mengorganisir pemilihan umum secara nasional. Meskipun tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan masih menjadi fokus reformasi, sistem politik Indonesia terus mengalami evolusi dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Anggara, 2013).

B. NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Negara dan pemerintahan merupakan dua pilar fundamental dalam suatu sistem politik yang bekerja sama untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat dan menjaga keberlangsungan suatu wilayah. Negara, sebagai entitas politik, memiliki ciri khas yang mencakup wilayah yang terdefinisi, penduduk, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk menjalankan hubungan internasional. Di Indonesia, konsep negara didasarkan pada Pancasila, falsafah dasar yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Labolo, 2023).

Sementara itu, pemerintahan merupakan lembaga dan individu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan negara. Pemerintahan Indonesia, yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki fungsi-fungsi utama seperti mengelola keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan keadilan melalui sistem yudikatif, serta merumuskan dan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat

1. Fungsi-fungsi Utama Negara dan Pemerintahan

Fungsi-fungsi utama negara dan pemerintahan merupakan fondasi dari penyelenggaraan tata kelola suatu negara. Pertama-tama, negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keamanan dan pertahanan negara. Ini mencakup pemeliharaan kedaulatan wilayah serta perlindungan terhadap warga negara dari ancaman baik dari dalam

negeri maupun luar negeri. Fungsi ini memberikan dasar bagi eksistensi negara dan memastikan stabilitas yang diperlukan untuk perkembangan sosial dan ekonomi.

Kedua, negara dan pemerintahan berperan dalam penyelenggaraan keadilan melalui sistem yudikatif. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung bertugas menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan kepada warga negara. Fungsi ini mencerminkan prinsip dasar hukum yang adil dan menjadi landasan bagi pemeliharaan ketertiban sosial.

Fungsi ketiga adalah pembentukan kebijakan. Pemerintahan, melalui lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat, merumuskan dan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keputusan dan kebijakan ini dapat mencakup isu-isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan nasional.

Pelayanan publik merupakan fungsi keempat yang penting. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan-layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemastian ketersediaan layanan publik yang baik mencerminkan peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Terakhir, negara dan pemerintahan terlibat dalam hubungan internasional. Diplomasi dan kerja sama internasional adalah bagian integral dari fungsi-fungsi negara modern. Melalui partisipasi dalam organisasi internasional, negara dan pemerintahan berupaya menjaga perdamaian, mempromosikan perdagangan, dan menanggapi tantangan-tantangan global bersama-sama. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, negara dan pemerintahan berperan sebagai arsitek utama dalam

membentuk dan memandu perkembangan masyarakat serta menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. Pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi-fungsi ini esensial untuk menganalisis kinerja pemerintahan, mengevaluasi dampak kebijakan, dan memastikan terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan (Powell et al., 2015).

2. Prinsip-prinsip Hukum dan Konstitusi

Prinsip-prinsip hukum dan konstitusi memainkan peran sentral dalam membentuk landasan dasar dan memandu tata kelola suatu negara. Pertama-tama, prinsip supremasi hukum menjadi fondasi utama, menetapkan bahwa hukum berada di atas segala orang dan lembaga, termasuk pemerintah itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan, baik dari warga negara maupun pemerintah, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, prinsip pembagian kekuasaan atau trias politica menjadi landasan penting dalam konstitusi. Ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan memberikan mekanisme pengawasan terhadap satu sama lain.

Prinsip ketertiban konstitusional merupakan aspek lain yang krusial. Ini menunjukkan bahwa konstitusi harus memiliki urutan dan struktur yang jelas, mencakup norma-norma dasar yang mengatur tata kelola pemerintahan dan hak-hak warga negara. Prinsip ini memberikan dasar hukum yang konsisten untuk menjaga stabilitas dan keadilan di dalam suatu negara. Selain itu, prinsip perlindungan hak-hak individu menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi modern. Ini mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat,

kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah asas yang melibatkan penanganan yang adil dan sama terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau gender. Ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Terakhir, prinsip fleksibilitas konstitusi memungkinkan untuk adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun konstitusi bersifat dasar, prinsip fleksibilitas memungkinkan revisi dan perubahan yang sesuai dengan perkembangan norma dan nilai dalam masyarakat (Chemerinsky, 2006).

C. SISTEM PRESIDENSIAL

Sistem presidensial adalah bentuk sistem politik di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu figur, yaitu presiden. Sistem ini berbeda dengan sistem parlementer di mana kepala negara dan kepala pemerintahan bisa berasal dari cabang eksekutif dan legislatif yang terpisah. Di bawah sistem presidensial, presiden terpilih melalui pemilihan umum dan memiliki kewenangan eksekutif yang besar. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem presidensial (Octovina, 2018).

Presiden dalam sistem presidensial tidak bergantung pada dukungan mayoritas dari legislatif untuk memegang jabatannya. Ini memberikan stabilitas keberlanjutan pemerintahan, tetapi juga dapat menyebabkan potensi konflik antara eksekutif dan legislatif jika keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Presiden memiliki hak veto terhadap Undang-Undang yang dihasilkan oleh legislatif, tetapi juga

terikat pada batasan konstitusional yang mengatur pembagian kekuasaan.

Keuntungan sistem presidensial melibatkan kepemimpinan yang kuat dan stabilitas pemerintahan, karena presiden terpilih memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Namun, kelemahan dapat timbul dalam bentuk ketidakcocokan antara eksekutif dan legislatif, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan reformasi. Oleh karena itu, sistem presidensial memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara kedua cabang pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sistem presidensial mewarnai dinamika politik negara ini sejak reformasi. Presiden Indonesia, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat dan memimpin pemerintahan melalui kabinetnya. Meskipun tantangan dan dinamika politik selalu ada, sistem presidensial tetap menjadi aspek kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah dua peran penting dalam suatu sistem politik yang dapat diemban oleh satu individu atau dua individu yang berbeda, tergantung pada struktur pemerintahan suatu negara. Kepala Negara adalah simbol kedaulatan dan representasi tingkat tertinggi negara. Peran ini seringkali memiliki dimensi seremonial dan simbolis yang mencerminkan identitas nasional dan kestabilan lembaga negara. Kepala Negara dapat menjadi monarki, presiden, atau kepala pemerintahan lainnya, bergantung pada bentuk pemerintahan suatu negara.

Di sisi lain, Kepala Pemerintahan memiliki tanggung jawab langsung dalam menjalankan

pemerintahan sehari-hari. Kepala Pemerintahan bertanggung jawab atas eksekusi kebijakan, pengelolaan administrasi pemerintahan, dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan luar negeri. Peran ini sering diemban oleh presiden, perdana menteri, atau kepala pemerintahan lainnya, tergantung pada sistem politik dan konstitusi yang dianut oleh suatu negara.

Dalam sistem presidensial, seperti yang dianut oleh Amerika Serikat, Presiden bertindak sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebaliknya, dalam sistem parlementer, seperti yang terlihat di Inggris, Ratu atau Raja berfungsi sebagai Kepala Negara, sementara perdana menteri memegang peran Kepala Pemerintahan. Perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan penting untuk dipahami karena mencerminkan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dalam sistem politik suatu negara, serta konsep-konsep yang melibatkan simbolisme dan tindakan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme esensial dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan perwakilan dan membentuk pemerintahan. Proses ini memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan umum diadakan secara berkala, dan pesertanya melibatkan berbagai partai politik atau kandidat independen yang bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat. Hasil pemilu mencerminkan kehendak mayoritas, dan pemimpin yang terpilih diharapkan untuk mewakili dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat. Pemilu

bukan hanya sarana menentukan pemenang, tetapi juga merupakan ekspresi nyata dari keterlibatan warga negara dalam mengelola nasib negara mereka. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum adalah bentuk kontribusi yang mendasar dari masyarakat untuk menjaga kesehatan demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang representatif.

D. ISU-ISU POLITIK KONTEMPORER DI INDONESIA

Indonesia menghadapi sejumlah isu politik kontemporer yang kompleks dan beragam, mencerminkan dinamika masyarakat yang berkembang. Salah satu isu utama adalah tantangan dalam menjaga keberagaman dan harmoni sosial di tengah pluralitas etnis, agama, dan budaya. Isu ini muncul dalam bentuk konflik horizontal, seperti konflik agama, serta polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas dan kohesi nasional (Pratiwi & Arifin, 2019).

Isu korupsi juga tetap menjadi perhatian serius di ranah politik Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun tantangan untuk menciptakan sistem yang benar-benar bersih dan transparan masih ada. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Selain itu, isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial terus menjadi sorotan. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah serius. Isu ini mencerminkan perlunya reformasi struktural untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi benar-benar merata dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks politik global, isu-isu seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan juga memengaruhi Indonesia. Negara ini perlu merumuskan kebijakan yang

adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan-tantangan global tersebut, termasuk dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Isu lain yang tidak kalah penting adalah perluasan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya untuk memastikan kebebasan berekspresi, hak untuk berserikat, dan hak partisipasi politik harus terus diperjuangkan untuk memperkuat dasar demokrasi Indonesia.

Sementara isu-isu politik kontemporer ini menantang, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengatasi mereka melalui kerjasama lintas sektor, penguatan lembaga-lembaga demokratis, dan pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi isu-isu ini, penting untuk mendorong dialog dan kolaborasi yang konstruktif untuk menciptakan solusi-solusi yang berkelanjutan demi kestabilan dan kemajuan negara.

BAB II

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

A. CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara, memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip negara kesatuan dan demokrasi. Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam struktur dan sistem pemerintahannya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan keanekaragaman budaya yang kaya, Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya.

Salah satu ciri utama struktur pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensialnya yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memegang peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan nasional serta menjalankan fungsi eksekutif bersama kabinetnya (Hartati, 2020). Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, Mahkamah

Konstitusi (MK) bertugas menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan keadilan di tingkat Nasional.

Struktur pemerintahan Indonesia juga mencakup unit-unit pemerintahan daerah yang dikenal sebagai pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan di tingkat lokal sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Bisri & Asmoro, 2019). Hal ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, struktur pemerintahan Indonesia juga mencakup lembaga-lembaga khusus yang bertugas dalam bidang-bidang tertentu, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi pengelolaan keuangan negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas dalam memberantas korupsi di berbagai sektor. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi bagian integral dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam perkembangannya, struktur pemerintahan Indonesia terus mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses reformasi ini tidak hanya melibatkan penyempurnaan regulasi dan kebijakan, tetapi juga transformasi budaya dan mindset dalam mengelola pemerintahan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai struktur pemerintahan Indonesia menjadi penting dalam upaya memahami dinamika politik dan pembangunan di negara ini. Masyarakat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

B. BADAN EKSEKUTIF

Badan eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden, yang merupakan kepala negara dan pemerintahan. Presiden memiliki peran dan fungsi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta Undang-Undang lainnya yang terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi badan eksekutif berdasarkan Undang-Undang yang berlaku:

1. Kepala Pemerintahan

Presiden adalah kepala pemerintahan Indonesia. Fungsi ini mencakup pengambilan keputusan strategis, pembuatan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di semua sektor pemerintahan.

2. Pelaksana Kekuasaan Eksekutif

Presiden bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, termasuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan mengelola administrasi negara.

3. Pemimpin Kabinet

Presiden membentuk kabinet atau dewan menteri yang bertanggung jawab membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi eksekutif di berbagai bidang.

4. Kepala Negara

Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga merupakan kepala negara Indonesia. Fungsi ini mencakup perwakilan negara baik dalam negeri maupun di tingkat internasional.

5. Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata

Presiden memiliki wewenang sebagai komandan tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI), yang mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap kekuatan militer negara.

6. Pembentuk Kebijakan Luar Negeri

Presiden memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri, menjalin hubungan dengan negara lain, serta melakukan diplomasi untuk kepentingan nasional.

7. Penandatanganan Undang-Undang

Presiden memiliki wewenang untuk menandatangani undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menjadi sah dan berlaku.

8. Pengambilan Keputusan Krisis

Presiden bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam situasi krisis atau darurat nasional, baik yang terkait dengan keamanan, bencana alam, maupun kesehatan masyarakat.

Peran dan fungsi Presiden serta badan eksekutif secara umum diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan rincian tugas dan kewenangan lebih lanjut bisa diatur dalam Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang pemerintahan dan administrasi negara.

C. BADAN LEGISLATIF

Badan legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan Undang-Undang dan pengawasan pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang yang berlaku:

1. Perwakilan Rakyat

DPR merupakan wakil dari rakyat Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR bertugas untuk mengartikulasikan aspirasi, kepentingan, dan hak-hak masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara (Suharjono, 2014).

2. Pembuat Undang-Undang

DPR memiliki kewenangan utama dalam pembuatan Undang-Undang. Anggota DPR dapat mengajukan, membahas, dan menetapkan rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang setelah melalui proses persetujuan bersama dengan presiden.

3. Pengawasan Pemerintahan

Salah satu fungsi utama DPR adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran negara, kebijakan publik, dan kinerja lembaga eksekutif.

4. Anggaran Negara

DPR memiliki wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.

5. Pengesahan Perjanjian Internasional

DPR terlibat dalam proses pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelum perjanjian tersebut dapat berlaku, DPR harus memberikan persetujuan atau pengesahannya terlebih dahulu.

6. Penganggaran

DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Ini mencakup pembahasan dan persetujuan terhadap rencana keuangan pemerintah, termasuk anggaran belanja dan pendapatan negara.

7. Pemberian Persetujuan

Beberapa keputusan penting, seperti penunjukan pejabat tinggi negara, pengesahan peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan Undang-Undang, dan penetapan keadaan bahaya, memerlukan persetujuan DPR.

D. BADAN YUDIKATIF

Badan yudikatif di Indonesia diwakili oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi, serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi kedua lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku:

1. Mahkamah Agung (MA)

a. Lembaga Peradilan Tertinggi

MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Fungsi utamanya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum yang berlaku (Arwana & Arifin, 2019).

b. Pengawasan Peradilan

MA bertugas melakukan pengawasan terhadap peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini termasuk memberikan pedoman hukum kepada pengadilan di tingkat lebih rendah serta meninjau keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pengadilan tersebut.

c. Penyelenggara Pendidikan Peradilan

MA memiliki fungsi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para hakim serta calon hakim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas peradilan.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

a. Penafsir Undang-Undang Dasar

MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menguji Undang-Undang terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi. MK juga berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden

serta hasil pemilihan umum legislative (Charity, 2016).

b. Pengujian Undang-Undang

MK dapat menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila terdapat dugaan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Apabila MK memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.

c. Perlindungan Hak Konstitusional

MK bertugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MK dapat memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional, seperti hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan hak warga negara lainnya.

E. PEMERINTAH DAERAH

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan utama, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Setiap tingkatan pemerintahan daerah memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun secara umum bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dan fungsi pemerintahan daerah di Indonesia:

1. Pemerintah Provinsi

a. Gubernur

Pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang merupakan kepala pemerintahan provinsi. Gubernur dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

DPRD Provinsi merupakan lembaga legislatif tingkat provinsi yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi.

c. Sekretariat Daerah (Setda)

Setda merupakan lembaga yang mendukung Gubernur dalam menjalankan tugas administratif dan koordinasi di tingkat provinsi.

d. Dinas-Dinas Provinsi

Terdapat berbagai dinas yang bertugas dalam menyelenggarakan berbagai bidang pelayanan publik di tingkat provinsi, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Bupati/Wali Kota

Pemerintah kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota yang merupakan kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. Bupati atau wali kota dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga legislatif tingkat kabupaten atau kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten atau kota.

- c. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Setda Kabupaten/Kota mendukung bupati atau wali kota dalam menjalankan tugas administratif dan koordinasi di tingkat kabupaten atau kota.
- d. Dinas-Dinas Kabupaten/Kota
Seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki berbagai dinas yang bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat kabupaten atau kota.

Struktur dan fungsi pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

F. OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Prinsip otonomi daerah menekankan pentingnya pemberian kekuasaan kepada daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta mempercepat pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

1. Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Pemberian Kewenangan
Pemerintah pusat mentransfer sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. Hal ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan

yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

b. Pengaturan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja, serta sumber daya keuangan lainnya. Otonomi keuangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Otonomi daerah juga melibatkan pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal, termasuk peningkatan kapasitas birokrasi daerah serta pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan.

d. Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat di wilayahnya. Dengan memiliki otonomi, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Otonomi daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa/kelurahan, pengelolaan dana desa, dan forum-forum partisipatif lainnya, masyarakat dapat turut serta dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

2. Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah

Peran masyarakat dalam pemerintahan daerah sangat penting dalam mendukung terwujudnya prinsip otonomi daerah. Beberapa peran masyarakat dalam pemerintahan daerah antara lain:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan terkait kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa/kelurahan, rapat-rapat umum, dan forum-forum konsultasi publik.

b. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah

Masyarakat memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik melalui mekanisme formal seperti DPRD maupun melalui kontrol sosial dari masyarakat secara langsung.

c. Pelaksanaan Program Pembangunan

Masyarakat juga turut serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat lokal, baik melalui partisipasi dalam kegiatan gotong royong maupun melalui penyediaan sumber daya lokal seperti lahan, tenaga kerja, dan lain-lain.

d. Penyampaian Informasi dan Masukan

Masyarakat memiliki peran dalam menyampaikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan berbagai masalah dan kebutuhan di wilayahnya.

BAB VII

TANTANGAN DAN PROSPEK SISTEM POLITIK INDONESIA

A. SEJARAH DAN EVOLUSI SISTEM POLITIK INDONESIA

1. Era Pra-Kemerdekaan

Bagian ini mengeksplorasi kondisi politik Indonesia sebelum kemerdekaan, termasuk pengaruh kolonialisme Belanda dan peran gerakan nasionalis dalam membangun fondasi politik modern Indonesia.

2. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Republik

Fokus pada periode sekitar kemerdekaan pada tahun 1945, termasuk pembentukan pemerintahan awal, perumusan konstitusi pertama, dan tantangan yang dihadapi oleh negara baru dalam mempertahankan kemerdekaan.

3. Era Orde Lama (1945-1966)

Analisis tentang era kepemimpinan Presiden Soekarno, termasuk penerapan sistem Demokrasi Terpimpin, konfrontasi politik domestik, dan kebijakan luar negeri seperti non-blok dan konfrontasi dengan Malaysia.

4. Era Orde Baru (1966-1998)

Penjelasan tentang masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang ditandai dengan stabilisasi politik dan ekonomi, tetapi juga dengan pembatasan kebebasan politik, praktik korupsi, dan penindasan terhadap oposisi.

5. Era Reformasi (1988-Sekarang)

Diskusi tentang transisi ke demokrasi pasca jatuhnya Soeharto, termasuk reformasi politik, liberalisasi partai politik, pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta tantangan-tantangan baru seperti korupsi, integrasi nasional, dan isu-isu hak asasi manusia.

6. Pengaruh Peristiwa Historis terhadap Politik Kontemporer

Evaluasi tentang bagaimana peristiwa historis tersebut membentuk sistem politik Indonesia saat ini, termasuk dampaknya terhadap politik, ekonomi, dan masyarakat. Dalam sebuah bab yang membahas “Pengaruh Peristiwa Historis terhadap Politik Kontemporer” di Indonesia, evaluasi mendalam akan dilakukan terkait bagaimana peristiwa historis telah membentuk dan terus mempengaruhi sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia saat ini. Kolonisme Belanda di Indonesia membentuk struktur pemerintahan dan administratif yang masih terlihat pengaruhnya hingga saat ini. Sistem hukum, administrasi publik, dan bahkan pembagian wilayah administratif di Indonesia banyak mengadopsi model yang diperkenalkan selama periode kolonial.

Gerakan kemerdekaan Indonesia, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh nasionalis, meletakkan dasar bagi politik nasionalis dan patriotisme di Indonesia. Nilai-nilai ini tetap menjadi komponen penting dalam politik Indonesia kontemporer. Masa-masa awal kemerdekaan, termasuk konflik internal dan perebutan kekuasaan, telah membentuk praktek politik Indonesia saat ini termasuk dampak revolusi sosial, pergolakan politik, dan

perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan (Ricklefs, 2008).

7. Analisis Kritis terhadap Sistem Politik Saat ini

Refleksi tentang kekuatan dan kelemahan sistem politik Indonesia saat ini, berdasarkan pengalaman historisnya. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam demokratisasi termasuk pelaksanaan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, peningkatan partisipasi publik dalam politik, serta perbaikan dalam kebebasan pers dan ekspresi. Pembahasan tentang bagaimana lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen dan sistem peradilan, telah berkembang sejak era reformasi. Analisis ini akan mencakup evaluasi independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjalankan fungsi.

B. STRUKTUR DAN KERANGKA KONSTITUSIONAL

Struktur dan kerangka konstitusional Indonesia akan memberikan gambaran tentang struktur pemerintahan negara tersebut dan bagaimana konstitusi mempengaruhi tata kelola negara. Berikut beberapa poin utama, diantaranya:

1. Konstitusi Indonesia

Pembahasan tentang Konstitusi Republik Indonesia, termasuk sejarahnya, perubahannya sejak kemerdekaan, dan prinsip-prinsip utama yang diatur di dalamnya mencakup penjelasan tentang pembukaan UUD 1945 dan amandemen yang terjadi pasca era reformasi (Feith, 2007b).

2. Struktur Pemerintahan

Penjelasan tentang tiga cabang pemerintahan di Indonesia yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana cabang-cabang ini diatur dan beroperasi sesuai dengan konstitusi.

3. Lembaga Eksekutif

Uraian tentang struktur dan fungsi lembaga eksekutif, termasuk peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta peran kabinet dan lembaga eksekutif lainnya.

4. Lembaga Legislatif

Analisis tentang fungsi dan struktur DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), serta proses pembuatan undang-undang dan pengawasan legislatif.

5. Lembaga Yudikatif

Diskusi tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk struktur pengadilan, independensi kehakiman, dan peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Penjelasan tentang bagaimana desentralisasi diatur dalam konstitusi dan praktiknya dalam pemerintahan daerah, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

7. Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Diskusi tentang bagaimana konstitusi Indonesia melindungi hak asasi manusia dan peran lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

8. Kritik dan Evaluasi

Analisis kritis terhadap kerangka konstitusional Indonesia saat ini termasuk tantangan dan isu kontemporer yang dihadapi dalam praktik konstitusionalisme Indonesia.

C. DINAMIKA POLITIK DALAM NEGERI

Dinamika politik dalam negeri Indonesia mencakup aspek-aspek seperti partai-partai politik, pemilihan umum, dan dinamika kekuatan politik internal termasuk peran politik dan regional. Pada tabel di bawah menyoroti bagaimana berbagai elemen seperti partai politik, pemilihan umum, dan

politik lokal atau regional berinteraksi dalam konteks politik nasional.

Tabel 1. Aspek Dinamika Politik

Aspek Dinamika Politik	Deskripsi	Contoh/Kasus
Partai-Partai Politik	Partai politik di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Menentukan kebijakan, mencalonkan kandidat, dan berpartisipasi dalam kampanye pemilu.	Misalnya PDIP, Golkar, dan Gerindra adalah beberapa partai politik besar di Indonesia.
Sistem Pemilihan Umum	Pemilihan umum di Indonesia terdiri dari pemilihan presiden, legislatif, dan daerah. Pemilu berlangsung secara berkala dan merupakan manifestasi demokrasi.	Pemilihan umum Presiden 2019, di mana Joko Widodo terpilih untuk periode kedua.
Koalisi Politik	Pembentukan koalisi sering terjadi di politik Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Koalisi ini penting untuk membentuk pemerintahan atau mengamankan dukungan legislatif.	Koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin melibatkan beberapa partai politik.
Politik Lokal dan Regional	Politik lokal dan regional di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan politik nasional, seringkali mencerminkan	Dinamika politik di daerah seperti Papua atau Aceh, yang memiliki keunikan sejarah dan politik.

	kepentingan dan isu spesifik daerah.	
Isu-isu Kontemporer	Isu-isu seperti korupsi, keadilan sosial, dan pembangunan infrastruktur sering menjadi pusat perhatian dalam politik Indonesia.	Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau isu tentang infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

D. ISU-ISU KONTEMPORER DALAM POLITIK INDONESIA

Dalam bab yang berfokus pada isu-isu kontemporer dalam politik Indonesia, beberapa tantangan dan masalah penting yang dihadapi oleh sistem politik Indonesia saat ini akan dieksplorasi secara mendalam. Analisis tentang prevalensi korupsi dalam politik Indonesia, termasuk dampaknya terhadap pemerintahan dan kebijakan publik. Penjelasan tentang upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tantangan yang dihadapi dalam melawan korupsi (Aspinall, 2010). Diskusi tentang bagaimana nepotisme dan koneksi politik mempengaruhi pengambilan keputusan dan pemerintahan termasuk bagaimana praktik-praktik ini menghambat meritokrasi dan efisiensi dalam pemerintahan.

Evaluasi status kebebasan pers di Indonesia, termasuk tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dan media. Diskusi tentang peran media dalam demokrasi dan bagaimana kebebasan pers mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Analisis tentang situasi hak asasi manusia di Indonesia termasuk isu-isu seperti kebebasan berbicara, hak-hak minoritas, dan penegakan hukum. Diskusi tentang bagaimana pemerintah dan organisasi internasional menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Ulasan tentang kebijakan publik utama di Indonesia termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Analisis tentang

bagaimana kebijakan ini mempengaruhi masyarakat dan tantangan dalam implementasinya.

Diskusi tentang bagaimana isu identitas etnis, agama, dan regional mempengaruhi politik Indonesia termasuk bagaimana polarisasi dapat mempengaruhi pemilihan umum dan kebijakan publik. Evaluasi tentang bagaimana globalisasi dan hubungan internasional termasuk perdagangan, diplomasi, dan konflik mempengaruhi politik domestik Indonesia. Diskusi tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil dan aktivis berkontribusi terhadap perubahan sosial dan politik di Indonesia serta tantangan yang dihadapi.

E. Prospek dan Arah Masa Depan Sistem Politik Indonesia

Dalam bab ini akan ada fokus pada prediksi dan harapan untuk masa depan politik Indonesia, melihat potensi reformasi, peran generasi muda, dan posisi Indonesia dalam panggung politik global. Beberapa topik penting yang akan dibahas yakni:

1. Reformasi Politik

Analisis tentang potensi reformasi politik yang terjadi di Indonesia termasuk perubahan dalam sistem pemilihan umum, penguatan lembaga demokrasi, dan upaya untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi.

2. Peran Generasi Muda

Diskusi tentang bagaimana generasi muda di Indonesia, yang semakin terlibat dalam politik, dapat membentuk masa depan politik negara tersebut termasuk peran media sosial, aktivisme, dan pendidikan politik.

3. Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

Proyeksi tentang bagaimana perkembangan ekonomi akan mempengaruhi politik Indonesia, termasuk isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur.

4. Tantangan Lingkungan dan Kebijakan Iklim

Analisis tentang bagaimana isu lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kebijakan politik di Indonesia termasuk keberlanjutan, konservasi, dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor ekonomi.

5. Dinamika Politik Regional dan Global

Pembahasan tentang bagaimana Indonesia dapat memposisikan dirinya dalam politik regional dan global, termasuk hubungan dengan negara-negara ASEAN, China, dan Amerika Serikat.

6. Isu-isu Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Proyeksi tentang bagaimana isu hak asasi manusia dan keadilan sosial akan terus mempengaruhi politik dalam negeri, termasuk kebijakan terhadap kelompok minoritas dan kebijakan anti diskriminasi.

7. Teknologi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Diskusi tentang peran teknologi dan inovasi dalam mengubah tata kelola pemerintahan termasuk e-governance dan partisipasi digital dalam proses politik.

8. Pengaruh Pandemi COVID-19

Refleksi tentang bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi politik Indonesia termasuk dampaknya terhadap ekonomi, kesehatan publik, dan kebijakan sosial.

F. STABILITAS POLITIK

Stabilitas politik merupakan faktor kunci dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia. Stabilitas ini tidak hanya penting untuk menarik dan mempertahankan investasi, tetapi juga vital dalam mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Menghadapi perubahan pemerintahan melalui proses demokratis yang transparan dan damai merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas politik. Transisi yang lancar dan teratur menunjukkan kematangan sistem demokrasi dan meningkatkan

kepercayaan investor. Mengelola perselisihan politik dan ketegangan sosial dengan cara yang damai dan konstruktif adalah kunci untuk mencegah ketidakstabilan. Hal ini mencakup dialog antar partai politik dan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Kebijakan ekonomi yang stabil dan konsisten, yang tidak terlalu berubah-ubah dengan perubahan pemerintahan dapat menjamin kepercayaan investor. Konsistensi ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi. Institusi yang kuat dan bebas dari pengaruh politik serta korupsi memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah bertujuan untuk kepentingan umum bukan kepentingan politik jangka pendek. Menanggapi isu-isu sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dengan cara yang efektif dapat mencegah ketidakpuasan sosial yang bisa mengarah pada ketidakstabilan politik.

Upaya untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas. Pendidikan politik bagi masyarakat termasuk pemahaman tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi politik yang damai berperan penting dalam mempertahankan stabilitas. Memelihara hubungan internasional yang baik dan stabil, baik dengan negara tetangga maupun kekuatan global juga penting untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik di Indonesia terutama dalam konteks sejarahnya yang kompleks dan keanekaragaman sosial budayanya, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Stabilitas ini tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan demokrasi di Indonesia.

G. Demokratisasi dan Konsolidasi Demokrasi

Demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan sejak era reformasi pada akhir tahun 1990-an. Namun, proses ini tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam memperkuat lembaga demokratis dan menjamin pemilihan yang adil dan bebas. Beberapa aspek penting dalam konteks demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, antara lain:

1. Penguatan Lembaga Demokratis

Salah satu tantangan utama adalah memperkuat lembaga-lembaga demokratis termasuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan sistem peradilan. Penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini bekerja secara efektif, transparan, dan bebas dari pengaruh politik dan korupsi.

2. Proses Pemilihan yang Adil dan Bebas

Meskipun pemilihan umum di Indonesia umumnya dianggap telah berjalan dengan lebih demokratis, masih ada tantangan dalam hal pemantauan pemilu, penanganan dugaan kecurangan, dan menyediakan akses yang setara bagi semua partai politik.

3. Partisipasi Politik yang Luas

Mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari semua lapisan masyarakat adalah kunci untuk demokrasi yang sehat termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemuda dan kelompok minoritas.

4. Kebebasan Pers dan Ekspresi

Kebebasan pers dan ekspresi adalah pilar penting dari demokrasi. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan, masih ada isu terkait pembatasan terhadap kebebasan pers dan ekspresi, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah (Mietzner, 2010).

5. Pemberantasan Korupsi

Korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam politik Indonesia. Upaya untuk memerangi korupsi, termasuk penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK, adalah kunci untuk memperkuat demokrasi.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia memerlukan pendekatan multifaset yang tidak hanya fokus pada aspek elektoral, tetapi juga pada penguatan lembaga, penegakan hukum, dan pembangunan budaya demokratis di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas sistem politik Indonesia, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memperkuat demokrasi dan pembangunan. Buku ini telah membahas beragam aspek sistem politik Indonesia, mulai dari struktur pemerintahan, peran partai politik, dinamika otonomi daerah, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak reformasi tahun 1998, dengan pergeseran menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, dalam prosesnya, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti korupsi, konflik kepentingan, dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Tantangan-tantangan ini menekankan perlunya reformasi lebih lanjut dalam tata kelola politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Buku ini juga mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem politik Indonesia, seperti pemberdayaan masyarakat lokal, inovasi kebijakan, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, buku ini menyoroti pentingnya terus menerus mengkaji dan memahami dinamika sistem politik Indonesia, serta melakukan reformasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, Indonesia dapat mencapai sistem politik yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). CV Pustaka Setia.
- Anggono, B. D., & Wahanisa, R. (2022). Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 18, 172–181. <https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.19>
- Anshari, F. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 91–101.
- Aris, M. (2017). *LOBBYISTS IN LEGISLATIVE PROCESS (STUDY COMPARATIVE IN THE USA AND INDONESIA)*.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. . . *Mulawarman Law Review*, 96–113.
- Aspinall, E. (2010). Indonesia in 2009: Democratic triumphs and trials. *Southeast Asian Affairs*, 2010(1), 102–125.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization* . Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2018). *Electoral Dynamics in Indonesia*. NUS Press Pte Ltd. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>

- Chandra, S. (2019). The Indonesian killings of 1965–1966: the case of Central Java. *Critical Asian Studies*, 51(3), 307–330. <https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1626751>
- Charity, M. L. (2016). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System). *Legislasi Indonesia*, 13(1), 1–10.
- Chemerinsky, E. (2006). *Constitutional Law: Principles and Policies*. Aspen Publishers.
- Elwan, L. O. M. (2018). Reconstructs Legislation: The Effectiveness of Presidential Veto in Government System in Indonesia Based on the State of The Republic of Indonesia 1945 Constitution. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 429. <https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I2.4511>
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>
- Feith, H. (2007a). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox.
- Feith, H. (2007b). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Gemiharto, I. (2023). Government Communication of the Regional House of Representatives in the Process of Formulating Regional Regulations in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 217–227. <https://doi.org/10.25008/JKISKI.V8I1.784>
- Goodin, R. E. (2011). *The Oxford Handbook of Political Science*. OUP Oxford.
- Hakim, A. R., & Darajat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan Identitas Nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337–1346.

- Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Hu, S. (2015). Research on Evaluation System for the Implementation of “Three Importance and One Greatness by Hospital Department.” *Hospital Management*.
- Idris, J., Hakim, A., Sarwono, S., & Haryono, B. S. (2019). The Political Process in the Preparation of Public Policy A Case Study on the Preparation of the Constitution of Oil and Gas in the Republic of Indonesia’s House of Representatives. *Holistica*, 10(1), 88–111. <https://doi.org/10.2478/HJBPA-2019-0008>
- Juniar, A. (2021). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 17–39. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>
- Kneuer, M., & Milner, H. V. (2019). *Political Science and Digitalization - Global Perspectives*. Verlag Barbara Budrich.
- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Malik, F., Wahid, A., & Fitriana, D. (2022). FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA). *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3051>
- Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2023). Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 148–158.
- Marwiyah, S., Melani, A. P., Seda, F. L., Hasanah, U., Kurniawan, S., & Fauzan, A. (2022). *Dinamika Politik Teori Kontemporer*.
- Mastur, Mh., Isharyanto, Hum, S. M., & Setiono. (2017). *KEY OF ROLE AND FUNCTION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL ON BICAMERAL SYSTEM IN INDONESIA*.

- Mietzner, M. (2010). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of East Asian Studies*, 10(3), 397–424. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1598240800003672>
- Octovina, R. A. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247–251.
- Pardiyanto, M. A. (2023). PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA. *Spektrum*, 20(2), 59. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i2.9138>
- Powell, G. B., Dalton, R. J., & Strom, K. J. (2015). *Comparative Politics Today: A World View, Global Edition*. Pearson Education.
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144–163.
- Rachayu, K. (2019). EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DALAM MEMBANGUN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA MASYARAKAT PEDESAAN. *Sosiohumaniora*, 21(1), 17. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*. Stanford University Press.
- Ridlwan, Z., & Nurbaningsih, E. (2018). Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy. *KnE Social Sciences*, 3(5), 573. <https://doi.org/10.18502/KSS.V3I5.2356>
- Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2008). *Political Science: An Introduction*. Pearson Prentice Hall.
- Shpinyov, Y. S. (2020). ON THE DEFINITION OF INVESTMENT IN LEGISLATION AND SCIENCE. *Vestnik of Kostroma State University*, 2, 217–223. <https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-217-223>
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>

- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Sulaeman, A. (2017). DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *CosmoGov*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>
- Sulaiman, K. F. (2023). Legislative Corruption: Criticism of the Omnibus Law Policy in the Mineral and Mining Sector in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 440. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202344004008>
- Suryanti, B. T., Legionosuko, T., & Halkis, M. (2023). KETERBATASAN PERSPEKTIF NEOREALISME DALAM KAJIAN ISU KEAMANAN KONTEMPORER. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), 4162–4169.
- Susanto, M., Prasetianingsih, R., & Sungkar, L. (2018). Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 23. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41>
- Ziegenhain, P. (2008). *The Indonesian Parliament and Democratization*. ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789812304865>

TENTANG PENULIS



Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, MPA.

Dosen Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gunung Kidul

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 01 Juni 1966. Penulis adalah dosen Kebijakan Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gunung Kidul. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIA Malang Jurusan Administrasi Negara; dan melanjutkan S2 pada Universitas Gadjah Mada Jurusan Manajemen Kebijakan Publik(MKP) Selanjutnya Melanjutkan S3 pada UNTAG SURABAYA Jurusan Ilmu Administrasi. Penulis menekuni bidang Penelitian Pariwisata dan Kebijakan Publik



Dr. Dahlan, S. Pd., M. Pd., M. Si.

Dosen Administrasi Publik
Program Pascasarjana IISIP YAPIS Biak Papua

Dr. Dahlan, S. Pd., M. Pd., M. Si. lahir di Garessi Barru pada tanggal 13 September 1990. Anak ketiga dari pasangan Bapak Syarifuddin M dan Ibu Hj. Yangkani. Telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studi Megister pada dua perguruan tinggi negeri yakni, di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar program studi Pendidikan IPS/Pendidikan Administrasi Umum selesai pada tahun 2015 dan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin program studi Administrasi Pembangunan selesai pada tahun 2016. Pada tahun sama kembali melanjutkan pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana UNM selesai tahun 2019.

Perjalanan karir tahun 2015 diangkat menjadi dosen tetap IISIP YAPIS Biak pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada Tahun 2022 dilantik menjadi Ketua Program Magister Prodi Administrasi Publik (S2) IISIP YAPIS Biak. Kemudian Pada Tahun 2023 terpilih dan dilantik menjadi Komisioner BAWASLU Kabupaten Biak Numfor Periode 2023 - 2028. Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan latihan dalam peningkatan

kompetensi sebagai dosen seperti; Dosen Magang tahun 2018 di Universitas Airlangga, Pelatihan PEKERTI dan Applied Approach (AA) serta telah dinyatakan sebagai dosen yang professional (tersertifikasi dosen).

Dalam bidang publikasi penulis senantiasa menulis artikel dalam berbagai media massa cetak dan elektronik dan publikasi jurnal nasional terakreditasi maupun internasional terindeks.



Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A., P.hD (C).

Dosen Universitas Negeri Malang

Kandidat Doktor S3 Information Science UiTM Malaysia

Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan studi doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi dikota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari

Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Malang dan di beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren di Malang Raya. Disamping kesibukan di dunia akademis penulis juga memiliki kegiatan pengabdian di masyarakat dengan mengisi seminar, workshop, dll.

Riwayat Mengajar:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RjEyRkFENzYtMEYxOS00QjE3LThFMzQtNTY1RkYwOTA3MzM1

Riwayat Publikasi Artikel:

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors?q=andi+asari>

Riwayat Penerbitan Buku:

https://www.google.com/search?q=andi+asari&tbm=bks&ei=WEHEYpa1OdWh4t4PkI2jqAw&ved=0ahUKEwiWwf3w8eH4AhXVKNgFHZDGCUMUQ4dUDCAg&oq=andi+asari&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEAxQAFgAYABoAHAAeACAAQCIQAQCSAQCYAQA&scient=gws-wiz-books

Riwayat Penelitian dan Pengabdian:

<https://pakar.um.ac.id/Data/Peneliti/view/eyJpdjI6Ikt5bFNGRVQyOURKVVdkNHFJUzVjR0E9PSIsInZhbHVlIjojUjhJNGtKUDA4OVlxQ0ZkR3hRRUR2RGZWbU9HMc2dGMvRHVSOG4zSW93QT0iLCJtYWMiOiI4ZGYxNTlmYjYwZTZmOWNmYjk4YTRiMGY1OGJiNTZkNDIwNTc5ZThkY2YxMzk3OWU0MWRkMjk1MWRjZjc3YWRkIn0=>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id

Scopus ID : 57213605546

Google scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=YVa5GeIAAAAJ>

Researchgate :

<https://www.researchgate.net/profile/Andi-Asari/research>

Youtube :

<https://youtube.com/channel/UCnNHvnNWspDB1pRQmBoI6ZQ>

<https://youtube.com/channel/UCJB00b8pPXR86HuLrv7tn-Q>

Facebook :

<https://www.facebook.com/andiasari.official/>

Instagram : andiasari.official